

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, diperkirakan terdapat lebih dari 66 juta UMKM di Indonesia, yang berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data ini sejalan dengan informasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2023 terdapat 65,5 juta unit usaha UMKM (Kemenko Perekonomian RI, 2023). Tingginya kontribusi tersebut menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang perlu mendapat perhatian lebih, khususnya dalam hal tata kelola usaha dan pelaporan keuangan yang baik.

Salah satu langkah yang diambil untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan UMKM adalah penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2016. Standar ini dirancang khusus agar dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana, relevan, dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016b). Dengan adanya standar ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas UMKM akan meningkat, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses pembiayaan dan memperluas jangkauan pasar.

Namun dilapangan, tingkat penerapan SAK EMKM di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Sebagian besar pelaku usaha masih menyusun laporan keuangan secara sederhana, bahkan tanpa mengikuti kaidah standar akuntansi (Putri et al., 2023). Ketidaklengkapan dan ketidakteraturan dalam pelaporan keuangan adalah salah satu permasalahan yang paling utama bagi UMKM dalam aspek keuangan (Malini, 2021). Hal ini tentu menghambat potensi UMKM untuk berkembang secara profesional dan berkelanjutan. Banyak pelaku UMKM yang percaya bahwa laporan keuangan hanya dibutuhkan untuk tujuan pajak, sehingga mereka tidak menyadari pentingnya menyusun laporan yang sesuai dengan standar akuntansi (Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), 2024). Menurut penelitian oleh Kurniawan (2024), pelaku UMKM yang memiliki pengetahuan akuntansi yang lebih baik cenderung lebih mampu mengelola keuangan mereka dengan baik, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja usaha mereka.

Rendahnya tingkat penerapan SAK EMKM di kalangan pelaku UMKM disebabkan oleh beberapa faktor internal. Salah satu faktor utama adalah tingkat pendidikan, yang dapat mempengaruhi sejauh mana mereka memahami pentingnya laporan keuangan dan seberapa baik mereka menyusun laporan sesuai standar (Teguh Erawati & Nugrastuti, 2024). Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan pelaku usaha memiliki kemampuan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Hidayatullah & Ardhani, 2024). Tingkat pendidikan merujuk pada level atau fase pendidikan yang harus dilalui sesuai dengan perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai,

serta kemampuan yang ingin dikembangkan (Sandora, 2023). Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur formal, nonformal, dan informal (Mutiar & Yudiantara, 2021). Penelitian Uyun et al., (2024) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif meskipun tidak terlalu besar, terhadap penerapan SAK EMKM.

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting, yaitu skala usaha semakin besar usaha, semakin kompleks kebutuhan pencatatan keuangan dan semakin besar dorongan untuk menggunakan standar akuntansi (Rahmadiani et al., 2024). Skala usaha mengacu pada besar kecilnya operasi usaha yang dilihat dari omset, aset, dan jumlah tenaga kerja. Semakin luas skala usaha, maka semakin bertambah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, yang terlihat dari bertambahnya jumlah pegawai (Nugraha & Bangun, 2022). Menurut Bakdiyanto & Ismunawan (2022) dan Andayani et al., (2024) ukuran usaha atau skala usaha berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK EMKM, sedangkan Istiknaful Aulia Nata (2024) menyebutkan bahwa skala usaha tidak berpengaruh signifikan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pemahaman akuntansi adalah pemahaman yang baik tentang konsep-konsep dasar akuntansi. Tanpa pemahaman yang baik tentang konsep akuntansi, pelaku UMKM akan kesulitan menyusun laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan (Habinsaran et al., 2024). Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman akuntansi lebih baik cenderung mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar (Oktavia & Masdiantini, 2023). Temuan penelitian dari Bakdiyanto & Ismunawan (2022)

menyebutkan hal serupa bahwa pemahaman akuntansi merupakan salah satu faktor yang signifikan.

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM pada tahun 2024 jumlah usaha UMKM di Kabupaten Ponorogo tercatat mencapai 24.370. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut terdistribusi di berbagai daerah di Kabupaten Ponorogo, mencakup 21 kecamatan yang berada di bawah pengelolaan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Salah satu wilayah tersebut adalah Kecamatan Siman, yang memiliki UMKM dengan jumlah sebanyak 675 unit. Dari jumlah tersebut, mayoritas bergerak di sektor perdagangan sebanyak (351 unit), usaha produksi (55 unit), dan usaha jasa berjumlah (128 unit). Meskipun jumlahnya tidak sebesar kecamatan lain, Kecamatan Siman memiliki jenis usaha yang beragam dan potensial untuk dikembangkan. Tingkat penerapan SAK EMKM di wilayah ini masih tergolong rendah, banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya penyusunan laporan keuangan sesuai standar, dan masih melakukan pencatatan secara konvensional atau bahkan tidak mencatat sama sekali. Berdasarkan hasil observasi terhadap 88 pelaku UMKM di Kecamatan Siman, diketahui bahwa hanya 28 UMKM (31,8%) yang telah menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan, sedangkan sebanyak 60 UMKM

(68,2%) belum menerapkannya, sehingga laporan yang disusun belum mampu mencerminkan kondisi usaha secara akurat (Hasil Observasi, 2025).

Pemilihan Kecamatan Siman sebagai lokasi penelitian tidak didasarkan pada jumlah UMKM yang tinggi, melainkan pada keberagaman jenis usaha serta rendahnya tingkat penerapan standar akuntansi. Masyarakat di Kecamatan Siman banyak menjalankan usaha di sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan yang sebagian besar masih dikelola secara tradisional. Dengan potensi pengembangan yang masih terbuka luas dan kebutuhan akan peningkatan kualitas pencatatan keuangan, wilayah ini dinilai relevan untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian terkait penerapan SAK EMKM di Kecamatan Siman sendiri masih sangat terbatas, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengisi celah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa belum optimalnya penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Siman masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari faktor internal pelaku usaha. Fenomena ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah tingkat pendidikan pelaku usaha, skala usaha yang dijalankan, serta pemahaman akuntansi yang dimiliki pelaku UMKM. Ketiga faktor tersebut diyakini berperan dalam mendukung atau menghambat pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul: "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro (SAK EMKM) pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM di Kecamatan Siman."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Siman?
2. Apakah skala usaha berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Siman?
3. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Siman?
4. Apakah tingkat pendidikan, skala usaha, dan pemahaman akuntansi berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Siman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Siman.
2. Untuk mengetahui pengaruh skala usaha terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Siman.

3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Siman.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, skala usaha, dan pemahaman akuntansi secara simultan terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Siman.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
 1. Penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian lapangan
 2. Menambah wawasan baru mengenai dalam memahami penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
 3. Menjadi referensi pribadi untuk penelitian lanjutan di bidang akuntansi UMKM

b. Bagi Almamater

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang akuntansi, khususnya terkait akuntansi UMKM dan penerapan SAK EMKM.
2. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa maupun sivitas akademika lainnya yang tertarik melakukan penelitian serupa.

c. Bagi UMKM di Kecamatan Siman

1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pelaku UMKM, khususnya di Kecamatan Siman, mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.
2. Diharapkan hasil penelitian ini mampu mendorong UMKM untuk lebih memperhatikan faktor-faktor internal yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya agar lebih akuntabel, transparan, dan profesional.
3. Menjadi acuan bagi UMKM sektor perdagangan, jasa, dan produksi di Kecamatan Siman agar dapat berkembang secara lebih profesional dan berkelanjutan.